

## Pengangguran Sarjana

Setiap liburan hari raya, saya selalu menyempatkan mudik, atau pulang kampung. Ketemu famili, teman lama dan yang paling penting “orang tua” adalah menjadi semacam ritual rutin yang tak boleh dilewatkan setiap tahunnya. Memang, kegiatan mudik ini tak ada yang mengharuskan, tetapi jika absen akan selalu menjadi bahan pertanyaan famili dan tetangga dekat, mengapa tak pulang. Entah mengapa, masyarakat desa menamai “pulang”. Padahal sudah lama saya meninggalkan kampung, dan tak pernah merasa memiliki rumah lagi di sana. Anehnya, saya dan juga isteri dan anak-anak ikut-ikutan menyebutnya “pulang”. Sudah mendekati 30 tahun, saya meninggalkan kampung dan telah berumah tangga di kota, tetapi masih saja berperasaan berumah di kampung asal. Ada perasaan yang sulit dilepas, bahwa rumah asli adalah di desa kelahiran, sedang rumah di kota, seolah-olah belum menjadi rumah milik yang sebenarnya. Perasaan seperti ini mungkin juga dialami oleh teman-teman lain yang bernasip sama.

Sesungguhnya, dalam tulisan ini saya tak ingin berbicara tentang mudik atau ikhwal pulang kampung. Pada kesempatan ini saya akan mengungkap hasil pengamatan saya di kala mudik itu tentang semakin banyaknya para sarjana yang tinggal di desa. Dua puluh tahun yang lalu, jangankan mencari seorang sarjana, bahkan sekedar mendapatkan lulusan madrasah aliyah sulitnya bukan main. Kini, dilihat dari sisi jumlah, sarjana yang tinggal di desa angkanya sudah luar biasa besarnya. Sebutan doktorandus, sarjana hukum, sarjana ekonomi, sarjana agama sangat mudah didapatkan. Bagi masyarakat de sapun juga sudah bukan menjadi barang aneh, oleh karena di mana-mana ada. Putra Pak Parman, tiga orang yang telah bergelar sarjana. Dua orang sarjana ekonomi dan seorang lagi sarjana pendidikan. Pak Yadi, dua-duanya sarjana, seorang sarjana agama sedangkan satunya lagi sarjana pendidikan. Pak Markun, seorang petani lumayan kaya, putra-putrinya sarjana semua. Penyebutan beberapa nama orang desa yang berputra-putrinya telah bergelar sarjana tersebut sekedar sebagai contoh, selain itu jumlahnya masih banyak sekali.

Para sarjana tersebut sejak awal tak memiliki cita-cita pulang ke desa. Banyak ceramah yang mengidealkan, setamat perguruan tinggi seharusnya segera kembali ke desa agar ikut membangun desanya. Tetapi, sebenarnya idealitas seperti itu tidak terlalu realistik. Sebab, di desa pada umumnya tak banyak tersedia lapangan kerja, kecuali bertani atau berdagang. Lapangan pekerjaan seperti itu pun hanya bisa dilakukan oleh mereka yang memiliki tanah dan juga modal. Sedangkan pada umumnya, mereka itu berlahan sempit dan bermodal terbatas. Bahkan, pada umumnya selesai mengirim putra-putrinya ke kota untuk kuliah, tanah dan modalnya habis untuk biaya kuliah tersebut. Sehingga, setamat putra-putrinya mengenyam pendidikan diikuti pula oleh tamatnya atau habisnya tanah dan modal yang dimiliki. Para sarjana itu kembali ke desa, lebih banyak dipaksa keadaan, yaitu oleh karena sulitnya mendapatkan pekerjaan di kota.

Semakin banyak sarjana menganggur di pedesaan mengakibatkan penghar- gaan masyarakat terhadap pendidikan, khususnya pendidikan tinggi, menjadi berkurang. Logika masyarakat desa mengatakan bahwa mengirim putra-putri mereka ke perguruan tinggi agar setelah lulus mendapatkan pekerjaan yang dapat dijadikan sumber penghidupan. Tetapi senyatanya keinginan itu akhir-akhir ini sulit

diwujudkan. Oleh karenanya, masyarakat menjadi sadar bahwa lulus perguruan tinggi bukan jaminan dapat dengan mudah memasuki dunia kerja. Maka akibatnya, banyak masyarakat yang mengambil jalan pintas, mengirim putra-putrinya ke lembaga pendidikan ketrampilan dan jika berkesempatan melamar pekerjaan ke lembaga penyalur tenaga kerja luar negeri. Bagi mereka yang tak mampu secara ekonomis bekerja apa adanya sebagaimana yang ditekuni oleh orang tuanya. Bagi masyarakat yang berkecukupan secara ekonomi mengirim anak ke perguruan tinggi lebih banyak dilatarbelakangi oleh maksud agar terhindar dari munculnya problem yang lebih parah tatkala putra-putrinya tidak berkuliah.

Mencermati fenomena di atas, mestinya pemerintah atau pengelola pendidikan tinggi seger merumuskan kembali orientasi pengembangan pendidikan tinggi agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Memberikan kebebasan kepada siapa saja mendirikan perguruan tinggi, selain tidak efisien, berakibat lahinya kekecewaan konsumen pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi mestinya didirikan, dikelola dan dikembangkan secara rasional. Pengembangan pendidikan tinggi hanya didasarkan atas kepentingan ekonomis dan ideologis seharusnya dicegah. Sebagai gambaran wajah pendidikan tinggi kita selama ini dapat dikemukakan data kasar sebagai berikut. Menurut informasi yang dapat dipercaya, di Indonesia terdapat 2000 lebih perguruan tinggi swasta, dan belum terhitung yang berstatus negeri. Padahal, menurut informasi pula, jumlah doktor (S3) dan guru besar juga belum seberapa. Data statistik mengatakan bahwa setiap sejuta penduduk Indonesia terdapat 60 orang doktor (S3), sehingga jika penduduk kita berjumlah 200 juta, berarti hanya terdapat 12.000 lulusan S3. Angka kasar ini menunjukkan belum adanya keseimbangan antara jumlah lembaga pendidikan tinggi dan ketersediaan tenaga pengajarnya. Ketidak seimbangan ini menjadi lebih parah jika dilihat secara saksama bahwa tidak semua Doktor mengajar di perguruan tinggi, dan belum ditambah lagi bahwa penyebaran lulusan S3 tersebut tidak merata. Memang senyatanya banyak perguruan tinggi yang tak memiliki sama sekali tenaga pengajar bergelar doktor. Jika dalam dokumen pengajuan akreditasi mencantumkan nama dosen berpendidikan S3, bisa jadi hanya kamuplase agar usulan pendirian perguruan tinggi dikabulkan atau agar berakreditasi baik.

Jika gambaran tersebut benar, maka sesungguhnya dalam dunia pendidikan tinggi kita telah terjadi manipulasi yang luar biasa, dan akibat lebih jauh akan terjadi proses mismanagement pendidikan yang luar biasa. Lagi-lagi, yang dirugikan adalah rakyat yang kebanyakan tak memahami seluk beluk pendidikan tinggi itu. Fenomena semakin banyaknya jumlah sarjana menganggur tersebut di muka adalah bentuk kongkrit dari korban penyelenggaraan pendidikan tinggi yang asal-asalan oleh karena kurangnya kesadaran masyarakat tentang kualitas pendidikan tinggi yang seharusnya diutamakan. Selain itu juga disebabkan oleh pengawasan yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah tampak kurang saksama. Allahu a'lam